

TANTANGAN OLIGARKI DALAM DEMOKRASI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN SISTEM POLITIK YANG LEBIH ADIL MELALUI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA JALAN SEI SELAYANG KELURAHAN MERDEKA KECAMATAN MEDAN BARU PROVINSI SUMATERA UTARA

Aisyah Nanda Putri¹, Fikri Aditya Hasibuan², Romiana Gultom³, Alya Sakyna Sembiring⁴, Nova Yanti Sinurat⁵, Lena Pithaloca Hutabarat⁶, Julia Ivanna⁷
aisyahnandaputri78@gmail.com¹, fikriaditia938@gmail.com², romianagultom4@gmail.com³,
alysakyna28@gmail.com⁴, novayantisinurat@gmail.com⁵, lenahutabarat23@gmail.com⁶,
juliaivanna@unimed.ac.id⁷

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tantangan oligarki dalam demokrasi sebagai upaya membangun sistem politik yang lebih adil melalui pandangan tokoh masyarakat di Jalan Sei Selayang, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan melibatkan wawancara serta observasi terhadap tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki kesadaran politik dan berupaya memilih secara bebas sesuai hati nurani, praktik oligarki masih kuat mempengaruhi proses demokrasi lokal. Dominasi elit melalui modal dan jaringan patronase menyebabkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan politik, politik uang yang marak, serta ketidakmerataan pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat mengharapkan keterbukaan informasi, peningkatan partisipasi publik, serta pendidikan politik sejak dini untuk memperkuat demokrasi yang substantif dan berkeadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan pengawasan untuk mengurangi dominasi oligarki guna mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis dan adil di tingkat lokal.

Kata Kunci: Oligarki Dalam Demokrasi, Tantangan Oligarki Dalam Demokrasi, Sebagai Upaya Membangun Sistem Politik Yang Lebih Adil.

ABSTRACT

This research discusses about the challenges of oligarchy in democracy as an effort to build a fairer political system through the views of community leaders on Jalan Sei Selayang, Merdeka Village, Medan Baru District, Medan City, North Sumatra. The study used a qualitative method with a descriptive approach and involved interviews and observations with local community leaders. The results show that although the community has political awareness and strives to vote freely according to its conscience, oligarchic practices still strongly influence the local democratic process. Elite domination through capital and patronage networks causes inequality in political decision-making, rampant money politics, and unequal development and public services. The community expects information transparency, increased public participation, and early political education to strengthen substantive and equitable democracy. This study emphasizes the importance of institutional reform and oversight to reduce oligarchic domination in order to realize a more democratic and equitable political system at the local level.

Keywords: *Oligarchy In Democracy, Challenges Of Oligarchy In Democracy, As An Effort To Build A Fairer Political System.*

PENDAHULUAN

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang berarti kekuasaan Rakyat. Demokrasi berasal dari kata “Demos” dan “Kratos”. Demos yang memiliki Arti rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang Mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua Warga negara. Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit).

Fenomena oligarki di Indonesia terlihat jelas pada berbagai sektor, terutama hukum. Suteki (2020) menggambarkan hal ini sebagai hegemoni oligarki, di mana kekuatan politik dan ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok elit mampu melemahkan prinsip supremasi hukum. Dalam praktik sehari-hari, hukum sering diperlakukan tidak adil: keras kepada masyarakat kecil, tetapi cenderung lunak terhadap mereka yang memiliki modal dan kekuasaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepentingan elit sering kali lebih diutamakan dibandingkan keadilan untuk seluruh rakyat.

Di tingkat lokal, praktik oligarki juga bisa ditemui. Penelitian Hasanudin dkk. (2021) di Kota Banjar, Jawa Barat menunjukkan bahwa pengusaha yang masuk ke dunia politik mendapatkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam perizinan, proyek pembangunan, hingga akses ke pembiayaan bank. Fenomena ini menandakan bahwa politik sering kali tidak berjalan untuk kepentingan publik, melainkan menjadi sarana transaksi kepentingan antara elit bisnis dan elit politik.

Praktik serupa juga terjadi di level desa. Hidayat (2019), melalui kajian Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung, Kediri, menemukan bahwa elit lokal berusaha memonopoli jalannya politik dengan memanfaatkan pengaruh dan sumber daya yang mereka miliki. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat bisa menjadi faktor penyeimbang untuk melawan dominasi elit, meskipun prosesnya penuh tantangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. (Rizal , 2023).

Jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bersifat humanistik, dimana manusia dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subyek utama dalam suatu peristiwa sosial. Dalam hal ini hakikat manusia sebagai subyek memiliki kebebasan berfikir dan menentukan pilihan atas dasar budaya dan sistem yang diyakini oleh masing-masing individu. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah jenis penelitian pendidikan di mana peneliti bergantung pada pandangan partisipan atau informan: peneliti bertanya panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, pengumpulan data sebagian besar terdiri dari kata-kata (atau teks) dari peserta, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut menjadi tematica, dan melakukan permintaan secara subyektif dan secara bias (memancing pertanyaan lainnya. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri dari penelitian kualitatif, yakni lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara induktif.

(Rizal, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Jalan Sei Selayang, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, ini mengungkapkan dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan demokrasi yang ideal di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memang mengaku mampu menentukan pilihan berdasarkan hati nurani dan penilaian pribadi terhadap kualitas kandidat dan program kerja yang ditawarkan. Kondisi ini menggambarkan adanya kesadaran politik yang semakin meningkat di masyarakat, yang menjadi fondasi kuat bagi pembentukan sistem politik yang sehat dan demokratis.

Semangat demokrasi tersebut terlihat kuat, realitas di lapangan memperlihatkan kehadiran praktik oligarki yang masih sangat dominan. Responden mengakui bahwa pilihan politik mereka sering dipengaruhi oleh intervensi sosial baik dari keluarga, tetangga, maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan sekitar. Interaksi sosial ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan politik seseorang tidak sepenuhnya independen, melainkan dipengaruhi oleh jaringan patronase yang menimbulkan ketergantungan dan dinamika sosial yang kompleks. Hal ini menandai bahwa demokrasi di akar rumput masih belum lepas dari budaya patronase dan kekuasaan yang mewarnai konteks sosial politiknya.

Fenomena oligarki ini juga semakin mencuat dengan praktik politik uang dan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya finansial yang menjadi salah satu faktor utama kemenangan dalam kontestasi politik. Banyak responden menggarisbawahi bagaimana calon pemimpin yang sejatinya baik dan jujur gagal meraih kemenangan karena keterbatasan dana untuk kampanye dibandingkan dengan kandidat yang memiliki modal besar dan jaringan patronase yang kuat. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi proses pemilihan tetapi juga berdampak pada aspek pelayanan publik dan pembangunan.

Masyarakat mengaku bahwa meskipun ada pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum, pengelolaan dan distribusinya masih lambat dan tidak merata. Kebijakan publik yang semestinya mengakomodasi kepentingan seluruh warga justru sering tertuju pada kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan elit atau jaringan kekuasaan. Akibatnya, ketimpangan sosial dan politik semakin menganga, dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat masih jauh dari kata merata.

Sebagai respons atas masalah tersebut, masyarakat menyuarakan kebutuhan akan keterbukaan informasi yang lebih besar dari pemerintah. Dengan transparansi yang baik, pengawasan publik dapat dilakukan lebih efektif, sehingga proses politik dan pengelolaan pemerintahan tidak berjalan di balik layar elite kekuasaan. Selain itu, partisipasi warga juga harus didorong tidak hanya pada saat pemilu tetapi dalam berbagai aspek pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan agar demokrasi dapat berfungsi secara menyeluruh.

Pendidikan politik sejak dini juga menjadi rekomendasi penting dari masyarakat. Dengan pendidikan yang memadai, generasi muda dapat dibekali kesadaran dan sikap kritis untuk menolak praktik politik uang dan janji kosong yang membelenggu demokrasi saat ini. Pendidikan politik diharapkan dapat memperkuat demokrasi substantif yang tidak hanya mengutamakan proses pemilu, tapi juga hasil yang nyata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa pembangunan sistem politik yang lebih adil dan demokratis di tingkat lokal tidak bisa dilepaskan dari upaya memerangi oligarki politik. Reformasi kelembagaan, pembukaan ruang partisipasi masyarakat, penguatan

transparansi, serta pendidikan politik yang menyeluruh menjadi kunci utama untuk menciptakan demokrasi yang benar-benar mewakili suara rakyat banyak, bukan hanya segelintir elit berkepentingan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi di tingkat lokal Jalan Sei Selayang, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, masih menghadapi tantangan dominasi oligarki politik yang kuat. Masyarakat secara umum memiliki kesadaran tinggi untuk berpartisipasi secara demokratis dan memilih berdasarkan pertimbangan pribadi, namun pengaruh sosial dari keluarga dan tokoh masyarakat masih cukup signifikan dalam menentukan pilihan politik.

Fenomena oligarki terlihat jelas dalam praktik politik uang dan dominasi modal yang menyebabkan calon pemimpin yang jujur dan berkualitas sering kali kalah bersaing karena minimnya dukungan dana dan jaringan. Ketimpangan politik ini tidak hanya menggerus prinsip demokrasi tetapi juga menyebabkan ketimpangan akses terhadap pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat, sehingga kebijakan lebih menguntungkan kelompok elit tertentu.

Selain itu, janji-janji politik yang tidak terealisasi secara nyata selepas pemilihan meningkatkan skeptisisme masyarakat terhadap sistem demokrasi. Transparansi yang minim dan pengawasan publik yang masih terbatas memperkuat dominasi elit dalam politik lokal. Oleh karena itu, meski demokrasi prosedural sudah berjalan, demokrasi substantif yang ideal masih jauh dari pencapaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023). Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa. *JURNAL HARMONI NUSA BANGSA*.
- As'ad, M. U., Barsihanor, & dkk. (2023). Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal ilmu politik*, 2-17.
- Hasanuddin. (2023). OLIGARKI DAN KEKUASAAN . *ilmu pemerintahan*, 91-99.
- Millah, A. S. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*.
- Nur, M. A. (2024). PENGOLAHAN DATA. *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 13074-13086.
- R. S. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 9680-9694.
- Rohmah, E. I. (2024). Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bonger. *jurnal ilmu politik*, 01-12.
- S. H. (2025). Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi . *journal of civic education research*, 2988-7380.
- Silaban, J. T. (2024). PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNDIP TERHADAP DEMOKRATISASI DI . *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN*, 43-50.
- syahputra nasution, A. R. (2021). Identifikasi Permasalahan Penelitian. *Journal Of Education*, 13-19.
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. 13-33.